

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Budaya Keselamatan

Menurut Della (2023) Budaya keselamatan mencakup nilai, keyakinan, dan norma yang membentuk perilaku individu atau kelompok terhadap keselamatan kerja, yang mencerminkan komitmen melalui tindakan sehari-hari untuk mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja aman. Menurut Shanty Yahya., (2024), budaya keselamatan adalah cara kita mengelola keselamatan di tempat kerja. Ini mencakup keyakinan, pandangan, dan sikap setiap pekerja terhadap keselamatan diri mereka sendiri dan juga keselamatan lingkungan kerja secara keseluruhan. Dengan kata lain, budaya keselamatan mencerminkan bagaimana pekerja berkomitmen untuk menjaga diri dan rekan kerja agar tetap aman di tempat kerja.

Selanjutnya, peneliti membagi penerapan budaya keselamatan menjadi beberapa aspek, yaitu: 1) Aspek kedisiplinan penggunaan alat keselamatan. 2) Aspek ketersediaan peralatan keselamatan. 3) Aspek kepedulian dan kesadaran terhadap keamanan dan keselamatan dalam bekerja. 4) Aspek pengawasan dan kepemimpinan perwira kapal. 5) Aspek pemahaman terhadap keselamatan kerja Aspek di atas di dukung oleh pernyataan Sumantri., (2023) terkait cara penerapan budaya keselamatan, yaitu melalui penyuluhan, pelatihan, pemeriksaan Kesehatan, penyediaan alat pelindung diri (APD) dan program pengawasan. Berbagai poin tersebut saling berhubungan, di mana jika salah satu tidak terlaksana dengan baik, maka akan mempengaruhi poin lainnya.

Menurut Arsyadi (2019), International Safety Management Code (ISM Code) merupakan regulasi manajemen internasional yang berfokus pada keselamatan operasional kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan laut. Penerapan ISM Code bertujuan untuk menjamin keselamatan kerja di laut, mencegah kecelakaan serta kehilangan jiwa, melindungi lingkungan maritim, dan menghindari kerusakan maupun kerugian terhadap kapal dan muatan.

Ardiansyah (2011) menjelaskan bahwa implementasi ISM Code berperan dalam meningkatkan kesadaran awak kapal terhadap pentingnya sistem manajemen keselamatan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meminimalkan kecelakaan fatal yang sering terjadi akibat kurangnya kompetensi atau keterampilan kru dalam mengoperasikan sistem dan peralatan kapal. Hal serupa ditegaskan oleh Luqman (2019) yang menyatakan bahwa penguasaan prosedur keselamatan dan standar operasional dapat menekan risiko kecelakaan kerja di atas kapal.

Secara konseptual, ISM Code merupakan standar manajemen internasional yang mengatur keselamatan operasional kapal dan pencegahan polusi laut. Dalam ketentuannya, terdapat beberapa istilah penting, antara lain: Kepala Operasional (Perusahaan): sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal; nonkonformitas sebagai ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen keselamatan yang berpotensi menimbulkan risiko; kejadian berbahaya sebagai kondisi yang dapat memicu kecelakaan; serta kecelakaan sebagai peristiwa yang menyebabkan cedera, kematian, kerusakan lingkungan, atau kerugian material. Selain itu, terdapat istilah designated person ashore, yaitu individu di darat yang ditunjuk Kepala

Operasional (Perusahaan): untuk memastikan penerapan sistem keselamatan berjalan sesuai ketentuan dan melaporkan langsung kepada manajemen puncak (Resky, 2021)

International Maritime Organization melalui konvensi SOLAS 1974 Bab IX dan MARPOL 1973 / 1978 menetapkan International Safety Management Code (ISM Code) sebagai standar sistem manajemen keselamatan yang berlaku secara internasional bagi Kepala Operasional (Perusahaan): pelayaran dan kapal yang dioperasikannya. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam membangun sistem manajemen yang bertujuan menjamin keselamatan operasional kapal serta mencegah pencemaran lingkungan laut.

ISM Code memuat enam belas elemen utama yang mengatur berbagai aspek manajerial dan operasional, meliputi:

1. Umum (General) Mengatur ketentuan dasar penerapan sistem manajemen keselamatan, termasuk definisi, tujuan, serta ruang lingkup keberlakuan ISM Code bagi Kepala Operasional (Perusahaan): dan kapal.
2. Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan, Kepala Operasional (Perusahaan): wajib menetapkan kebijakan tertulis yang menegaskan komitmen terhadap keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan, serta perlindungan lingkungan laut.
3. Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Operasional (Perusahaan):, Kepala Operasional (Perusahaan): bertanggung jawab memastikan sistem manajemen keselamatan diterapkan secara efektif, termasuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai.

4. Designated Person Ashore (DPA) atau Orang Yang Ditunjuk, Kepala Operasional (Perusahaan): harus menunjuk seorang atau lebih personel di darat yang memiliki akses langsung ke manajemen puncak untuk memantau dan menjamin pelaksanaan sistem keselamatan.
5. Tanggung Jawab dan Wewenang Nakhoda, Nakhoda memiliki kewenangan tertinggi di kapal dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan serta memastikan seluruh awak kapal mematuhi prosedur.
6. Sumber Daya dan Tenaga Kerja, Kepala Operasional (Perusahaan): wajib memastikan awak kapal memiliki kualifikasi, pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas secara aman.
7. Pengembangan Prosedur Pengoperasian Kapal, Kepala Operasional (Perusahaan): harus menyusun prosedur operasional standar untuk seluruh aktivitas penting di kapal guna menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan.
8. Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat, Diperlukan prosedur tanggap darurat dan latihan berkala untuk memastikan kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran atau kebocoran.
9. Pelaporan dan Analisis Ketidaksesuaian, Kecelakaan, dan Kejadian Berbahaya Setiap insiden harus dilaporkan, dianalisis, dan dievaluasi guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
10. Pemeliharaan Kapal dan Perlengkapannya, Kapal dan seluruh peralatannya harus dirawat secara teratur agar tetap dalam kondisi laik laut dan aman dioperasikan.

11. Dokumentasi, Sistem manajemen keselamatan harus terdokumentasi dengan baik, termasuk prosedur, instruksi kerja, dan catatan pelaksanaan.
12. Verifikasi, Tinjauan, dan Evaluasi Kepala Operasional (Perusahaan):, Kepala Operasional (Perusahaan): wajib melakukan audit internal dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas sistem manajemen keselamatan.
13. Sertifikasi, Verifikasi, dan Pengawasan, Kapal dan Kepala Operasional (Perusahaan): harus menjalani proses sertifikasi serta pengawasan oleh otoritas atau badan klasifikasi yang berwenang.
14. Sertifikasi Sementara, Sertifikat sementara dapat diterbitkan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk kapal baru atau Kepala Operasional (Perusahaan): yang baru menerapkan sistem.
15. Formulir Sertifikat, Mengatur bentuk dan isi sertifikat keselamatan yang diterbitkan sesuai standar internasional.
16. Verifikasi, Meliputi proses pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh ketentuan ISM Code telah diterapkan dan dipatuhi secara konsisten.

Dari keseluruhan elemen tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada elemen keenam, yaitu sumber daya dan tenaga kerja, karena aspek ini berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan keselamatan kerja di atas kapal. Ketersediaan awak kapal yang kompeten, terlatih, dan memahami prosedur menjadi faktor kunci dalam memastikan sistem manajemen keselamatan berjalan optimal.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ISM Code belum sepenuhnya berjalan sesuai standar. Masih ditemukan kendala seperti rendahnya kedisiplinan personel, kurang optimalnya pengawasan dari atasan, serta pelaksanaan pekerjaan

yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja, kebakaran, maupun kerusakan kapal. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan melalui penguatan sosialisasi Safety Management System (SMS), peningkatan pelatihan, serta pengembangan kompetensi awak kapal secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan risiko operasional dan mendukung terciptanya keselamatan pelayaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, International Safety Management Code (ISM Code) dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan internasional dalam bidang manajemen keselamatan pelayaran yang bertujuan untuk:

- (1) menjamin keselamatan pelayaran,
- (2) mencegah cedera dan kehilangan nyawa manusia, serta
- (3) melindungi lingkungan laut dan aset Kepala Operasional (Perusahaan): dari kerusakan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada beberapa teori dan peneliti terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	(Resky, 2021)	Peran Designated Person Ashore (DPA) Dalam Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pelayaran	Kualitatif	Designated Person Ashore (DPA) Berperan Sebagai Penghubung Antara Manajemen Darat Dan Kapal. Efektivitas Implementasi Ism Code Sangat Dipengaruhi Oleh Kompetensi DPA, Dukungan Ma-

				najemen Puncak, Serta Intensitas Monitoring Terhadap Pelaksanaan Prosedur Keselamatan.
2	(Lappalainen, 2014)	Evaluation Of The ISM Code In Maritime Safety Management.	Kualitatif	ISM Code Meningkatkan Struktur Dokumentasi Dan Prosedur Keselamatan, Namun Efektivitasnya Sangat Tergantung Pada Komitmen Manajemen Dan Budaya Organisasi. Implementasi Yang Bersifat Administratif Terbukti Kurang Berdampak Pada Perubahan Perilaku Keselamatan.
3	(Luqman, 2019)	Analisis Penerapan Prosedur Keselamatan Kerja Di Atas Kapal Berdasarkan Ism Code.	Kualitatif	Sebagian Besar Prosedur Telah Diterapkan, Namun Kedisiplinan Awak Kapal Dan Pengawasan Atasan Menjadi Faktor Penentu Keberhasilan. Pelatihan Rutin Terbukti Meningkatkan Pemahaman Terhadap Safety Management System (SMS).
4	(Battalden, 2014)	Maritime Safety And The ISM Code : A Study Of Implementation Challenge	Kualitatif	Tantangan Utama Meliputi Beban Administratif, Kurangnya Pengawasan Regulator, Serta Perbedaan Persepsi Antara Manajemen Dan Awak Kapal. Implementasi Cenderung Formalistik Jika Tidak Diiringi Komitmen Budaya Keselamatan.
5	(Bhattacharya, 2012)	The Effectiveness Of The ISM Code : A Qualitative Investigation. Marine Policy,	Kualitatif	ISM Code Efektif Sebagai Kerangka Regulator, Namun Dalam Praktiknya Sering Dipandang Sebagai Kewajiban Sertifikasi. Perubahan Nyata Dalam Budaya Keselamatan Hanya

				Terjadi Pada Organisasi Yang Memiliki Kepemimpinan Keselamatan Yang Kuat.
6	(Fadjri Et Al., 2025)	Kajian Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (ISM Code) Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Pelayaran Di Indonesia	Kualitatif	Implementasi ISM Code Berkontribusi Pada Penurunan Potensi Kecelakaan, Namun Masih Terdapat Kendala Berupa Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dan Lemahnya Pengawasan Berkala Dari Regulator.
7	(Santoso Et Al., 2020)	Budaya Keselamatan Dan Model Kepemimpinan Keselamatan Dalam Menjamin Terwujudnya Motivasi Keselamatan Pelayaran Kapal-Kapal Niaga Dengan Moderasi Sistem Manajemen Keselamatan (ISM Code)	Kualitatif	Budaya Keselamatan Dan Kepemimpinan Keselamatan Berpengaruh Signifikan Terhadap Motivasi Keselamatan. ISM Code Berperan Sebagai Variabel Moderasi Yang Memperkuat Hubungan Tersebut Apabila Diterapkan Secara Konsisten.

Sumber : Penelitian 2026

2.3.Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti membuat alur pemikiran untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah peneliti sampaikan sebagai berikut: Kerangka peranan yang dijelaskan oleh (Soerjono Soekanto, 2009) dapat diaplikasikan dalam menganalisis Peran Regulator Dalam Mendorong Penerapan ISM Code, Untuk menjadikan penulisan lebih jelas dan mudah dipahami, penulis akan membahas kerangka pikir terkait peran ISM Code. Penulis merancang sebuah ide pemikiran.

Apabila *ISM Code* dapat terlaksana dengan baik sehingga Awak Kapal dapat menghindari atau minimalisir dari bahaya dari kecelakaan di atas kapal.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

